

HUBUNGAN KELEMBAGAAN POLITIK DI DESA BUMBUN KECAMATAN SADANIANG
KABUPATEN PONTIANAK DALAM PRESPEKTIF POLITIK DESENTRALISASI DAN
OTONOMI DAERAH

GANDUT
E.02109007

Program Studi Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak
gandut_sadaniang@ymail.com

Abstrak

Penulisan penelitian ini berawal dari keinginan pemerintah Nasional Indonesia untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan asas desentralisasi. Seiring dengan itu, maka di tingkat desa diselenggarakan pemerintahan otonomi oleh dua lembaga politik di tingkat desa yaitu Pemerintah Desa (Kepala Desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berkedudukan sejajar dan bermitra. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Dari hasil penelitian ternyata hubungan sejajar dan bermitra antara kedua lembaga tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya dan cenderung mengarah kepada dominasi BPD khususnya dalam urusan pembangunan desa yang disebabkan oleh tiga faktor yaitu faktor sumber daya manusia pemerintahan desa, faktor kapasitas pemerintah desa, serta faktor partisipasi masyarakat desa.

Kata kunci: Lembaga Pemerintahan Desa, Pemerintahan Desa, Otonomi Daerah, Pembangunan Desa.

Abstract

This writing study originated from the Indonesian government's desire to hold the regional autonomy with the principle of decentralization. Along with that, the village-level self-government organized by two political institutions at the village level ie village government (village head) and the Village Consultative Board (BPD) which is located parallel to and partnering. This study uses qualitative research methods with descriptive research. From the research, it turns parallel relationship and partnership between these two institutions do not function as it should and is likely to lead to the dominance of BPD, especially in matters of rural development due to three factors: the human factor of the village administration, village government capacity factor, and the factor of rural community participation .

Keywords: Village Government Institutions, Village Governance, Autonomy, Rural Development.

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia memiliki wilayah yang luas sehingga menjadi pendorong pemerintah nasional untuk menyelenggarakan otonomi daerah kepada pemerintah daerah dengan asas desentralisasi dengan harapan mampu mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan sampai di tingkat desa demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Desa merupakan institusi yang bersifat otonom dan masih memegang teguh tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Otonomi desa merupakan hak dan fungsi kewenangan

untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat di desa oleh pemerintahan desa. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa (Pemdes) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat di desa dengan menyesuaikan kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemdes dan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa

berkedudukan sejajar dan merupakan mitra kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing. Kedudukan sejajar antara kedua lembaga politik ini memiliki tempat dan kedudukan yang sama rata, serta tidak dibenarkan saling menguasai antara satu dengan yang lainnya. Sedangkan hubungan sebagai mitra kerja dapat diartikan sebagai hubungan kerjasama dalam hal yang positif dalam menyelenggarakan pemerintahan desa.

Desa Bumbun merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Sadaniang, memiliki letak geografis yang strategis dan sumber daya alam melimpah namun tidak didukung oleh infrastruktur yang memadai seperti jalan desa, air bersih, jembatan, listrik, kantor desa. Lambannya pembangunan di desa ini salah satunya disebabkan adanya lembaga politik desa yang belum bisa melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal. Penelitian difokuskan pada bentuk hubungan antara Pemdes dengan BPD dengan rumusan masalah adalah bagaimana bentuk hubungan, dan apa faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan hubungan antara kedua lembaga tersebut, dengan tujuan penelitian yaitu mendeskripsikan bagaimana bentuk hubungan dominasi, subordinasi dan kemitraan, serta mendeskripsikan apa saja yang menjadi faktor penghambatnya.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Secara konstitusional pengertian desentralisasi dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 Ayat 7 bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Desentralisasi merupakan konsekuensi dari demokrasi dengan tujuan membangun *good governance* mulai dari akar rumput politik. Desentralisasi juga menghasilkan pemerintahan lokal (*local governance*), adanya pembagian kewenangan serta tersediannya ruang gerak yang memadai (dalam Haris, 2005:40). Secara historis menurut Santoso (2003:2) desa adalah embrio bagi terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia. Otonomi desa menurut Widjaja (2005:165) merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah.

Menurut Budiardjo (2009:97) “institusi atau kelembagaan adalah organisasi yang tertata melalui pola perilaku yang diatur oleh peraturan

yang telah diterima sebagai standar”. Hal itu sesuai dengan pendapat Munawar (2006:37) menurutnya “untuk menyelenggarakan kehidupan masyarakat desa diperlukan adanya lembaga-lembaga yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Lembaga-lembaga tersebut meliputi lembaga pemerintah desa, lembaga legislatif, lembaga pengawasan, lembaga ekonomi dan lembaga-lembaga lain sesuai dengan kebutuhan setempat”. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pasal 14 menyebutkan bahwa tugas Kepala Desa adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan (ayat 1), sedangkan dalam pasal 1 ayat 8 didefinisikan bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Hubungan kerja dalam pemerintahan dapat digolongkan menjadi dua jenis yaitu: *Pertama* hubungan kerja hirarkis bersifat vertikal adalah hubungan kerja timbal balik antara atasan dengan bawahannya, dari tingkat pejabat tinggi sampai kepada pejabat paling rendah. *Kedua*, hubungan kerja fungsional yang bersifat horizontal dan merupakan kerjasama antara dua atau lebih unit organisasi/pejabat yang mempunyai kedudukan yang setingkat, demi terwujudnya kerjasama yang harmonis sebagai satu kesatuan yang menyeluruh (Kansil, C.S.T dan Christine S.T. Kansil, 2008:126). Sedangkan menurut Yukl (1991) ada tiga model hubungan organisasional, yaitu: hubungan dominasi, hubungan subordinasi dan hubungan kemitraan (<http://pustakaonline.wordpress.com/2008/03/22/kemitraan-pemerintah-desa-dengan-badan-perwakilan-desa-dalam-penyelenggaraan-pemerintahan-desa/>), diakses tanggal 24 Oktober 2013, pukul 17.25).

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang berusaha menggambarkan objek dan subjek sesuai dengan apa adanya, dengan empat tahap penelitian yaitu menetapkan permasalahan, merancang metode penelitian, mengumpulkan data dan mengolah, menganalisis dan melakukan interpretasi data, serta menyusun laporan atau menulis skripsi (Mulia dan Tohardi, 2005:58). Penelitian dilakukan di Desa Bumbun dengan

pertimbangan bahwa desa tersebut merupakan salah satu desa miskin di Kecamatan Sadaniang dengan subjek penelitian adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua dan anggota dari BPD, pemuka masyarakat atau Ketua Adat, Ketua RT, serta individu yang dianggap bisa memberikan informasi mengenai permasalahan penelitian, dengan instrumen penelitian yaitu panduan observasi, pedoman wawancara, dan alat dokumentasi. Analisis data dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan (dalam Sugiyono, 2008:89). Pemeriksaan kabsahaan data menggunakan teknik triangulasi yaitu teknik pemeriksaan kabsahaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data itu (Moleng, 2004: 178). Dalam penelitian ini penulis memilih teknik triangulasi sumber yaitu dengan membandingkan dan mengecek kembali informasi yang didapat dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan waktu atau situasi yang berbeda secara berulang-ulang sampai ditemukan kepastian data.

D. PEMBAHASAN

D.1. Bentuk Hubungan Antara Pemerintah Desa (Pemdes) dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Bumbun

Hubungan kerja antara Pemerintah Desa dengan BPD memiliki hubungan sebagai mitra kerja dan berkedudukan sejajar. Sehingga antara kedua lembaga politik desa ini dalam menjalankan tugas dan fungsinya seharusnya saling menghargai dan melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Namun hubungan demikian tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya karena disebabkan oleh beberapa kendala sebagaimana akan saya jelaskan di bawah ini.

1. Bentuk Hubungan dominasi

Pemerintah Desa (Kepala Desa) merupakan lembaga politik di tingkat desa yang berfungsi sebagai penyelenggara berbagai urusan yang langsung berhubungan dengan kepentingan dan kebutuhan warga masyarakatnya. Kepala Desa dituntut untuk mampu menjalankan serta melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan sebaik mungkin, sehingga diharapkan kesejahteraan warga masyarakatnya dapat segera tercapai yang salah satunya melalui pembangunan di desanya. Pembangunan di desa ini (Desa Bumbun) berdasarkan hasil wawancara serta pengamatan di lapangan belum

mengalami perubahan yang signifikan sehingga terkesan hanya berjalan ditempat. Belum mempunyai pemerintah desa/kepala desa dalam membangun desanya terjadi dalam kurun waktu 12 tahun atau dua priode kepemimpinan kepala desa lama. Hal tersebut salah satunya disebabkan karena kurang mampu dan atau kurang cakupnya pemerintah desa/kepala desa dalam menggali atau memanfaatkan sumber daya yang ada di desanya. Ketidak mampuan pemerintah desa/kepala desa dalam membangun desanya terlihat juga dari ketidak mampuannya dalam menjalin hubungan kerja dengan lembaga BPD dan Pemerintah kabupaten yang merupakan mitra kerja dari pemerintah desa itu sendiri. Hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh At (seorang informen) "pemerintah desa (kepala desa) seharusnya mampu menjalin koordinasi dan kerjasama dengan baik dengan pemerintah diatasnya (pemerintah kabupaten), sehingga pembangunan di desa dapat segera tercapai, bukan sebaliknya, justru di desa kami yang lebih berperan aktif adalah dari pihak BPD, padahal mereka tidak memiliki hubungan kerja sebagaimana yang dimiliki oleh pemerintah desa". Sedangkan hal lain yang menjadi penyebab keterlambatan pembangunan di desa ini, khususnya yang berada di wilayah kecamatan Sadaniang dikarenakan kecamatan ini merupakan kecamatan yang baru terbentuk sehingga memerlukan waktu yang cukup lama. Artinya pembangunan yang ada di desa sampai saat ini memang masih mengandalkan bantuan dari pemerintah daerah, baik pemerintah kabupaten, provinsi maupun pemerintah pusat. Dari penuturan diatas maka dapat dikatakan bahwa keterlibatan pemerintah desa atau kepala desa di Desa Bumbun khususnya dalam urusan pembangunan fisik desa belum mampu dilaksanakan secara maksimal, dimana terkesan lebih bersifat pasif sehingga hal itu berakibat juga pada lambannya pembangunan yang ada di desa.

2. Bentuk hubungan subordinasi

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga legislatif desa yang berfungsi sebagai lembaga yang mengawasi pelaksanaan pemerintahan oleh Pemerintah Desa (eksekutif desa) agar bisa berjalan dan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan dari masyarakat yang diwakilinya. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di sebagian daerah masih banyak mengalami kendala, salah satunya ialah dari pemerintah desa itu sendiri yang seolah tidak siap dalam menjalankan tugas yang

diembankan kepada dirinya. Sebagaimana yang terjadi di Desa Bumbun dimana pemerintah desa (Kepala Desa) dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya khususnya dalam membangun desanya terlihat kurang begitu cakap dan terampil yang nampak dalam kurun waktu dua priode kepemimpinannya tidak mengalami perubahan yang signifikan. Sehingga hal itu menyebabkan lembaga (BPD) lain yang menjadi mitra kerjanya secara tidak langsung mengambil alih apa yang seharusnya menjadi tugasnya (khususnya dalam urusan pembangunan desa) atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa hubungan antara Pemerintah Desa (Kepala Desa) dengan BPD yang ada di desa ini lebih didominasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Terjadinya dominasi BPD tersebut bukan disebabkan karena adanya perbedaan pendapat dan atau pertentangan diantara keduanya, tetapi lebih disebabkan karena kurang mampunya pemerintah desa itu sendiri dalam menjalankan tugasnya. Wujud kongkret dari terjadinya dominasi itu terlihat dari proses menyusun dan pengajuan rancangan pembangunan desa yang lebih didominasi oleh BPD.

3. Bentuk hubungan kemitraan

Hubungan kemitraan antara Pemerintah Desa (Kepala Desa) dengan BPD dalam menyelenggarakan pemerintahan desa dapat diartikan sebagai hubungan kerja yang saling melengkapi dan menyeimbangi kekurangan antar satu lembaga dengan lembaga lainnya, sekaligus mampu memahami tugas, fungsi serta kewenangan masing-masing sebagai aparatur pemerintahan desa. Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, antara Pemerintah desa dengan BPD diharapkan mampu bersinergi dan bermitra dengan baik dan tepat dalam menentukan arah kebijakan sehingga pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di desanya juga dapat segera tercapai. Hubungan kerja antara Pemerintah Desa (Kades) dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Bumbun dalam pelaksanaan pemerintahannya idealnya menyesuaikan pola hubungan sebagai mitra yang berkedudukan sejajar, namun ternyata dalam penyelenggaraannya atau penerapannya di lapangan (di desa Bumbun) belum berjalan sesuai dengan yang diinginkan, dimana lebih didominasi oleh lembaga BPD. Hal itu dikarenakan adanya hambatan atau permasalahan yang dihadapi oleh pemerintahan desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa yang ada di lapangan (di desanya). Sehingga permasalahan

tersebut juga berakibat pada pelayanan dan kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri.

D.2. Kendala hubungan antara Pemerintah Desa (Pemdes) dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Bumbun

Penyelenggara pemerintahan desa oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga politik di tingkat desa dalam mewujudkan pembangunan bagi warga masyarakatnya merupakan tanggung jawab dan tuntutan yang harus segera dilaksanakan demi tercapainya kesejahteraan warga masyarakatnya, dan salah satunya dapat dilakukan dengan pembangunan sarana dan prasarana di desa. Namun untuk dapat melaksanakan dan mewujudkan itu semua tidaklah semudah yang kita bayangkan, karena harus diakui bahwa pemerintah desa tidaklah selalu sempurna tanpa ada kekurangan ataupun kendala-kendala yang mempengaruhinya. Berikut ini akan penulis jelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi hubungan antara Pemerintah Desa dengan BPD di desa Bumbun.

1. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM) Pemerintahan Desa

Sumber daya manusia (SDM) menurut Nawawi adalah manusia yang bekerja dilingkungan suatu organisasi yang merupakan aset atau modal dan dapat diwujudkan dalam eksistensi organisasi tersebut (dalam Sedarmayanti, 2007:287). SDM bagi pemerintah desa (kepala desa) memiliki posisi dan peranan yang strategis dalam menentukan keberhasilan suatu pemerintahan, salah satunya berupa pembangunan sarana dan prasarana fasilitas umum di desa. Hal itu berarti bahwa jika SDMnya berkualitas, maka kinerja yang dihasilkan juga akan berkualitas, dan sebaliknya jika sumber daya manusianya rendah maka hasil kerjanya pun kurang memuaskan dan bahkan tidak berkualitas. Rendahnya kemampuan pemerintahan desa dalam menjalankan tugasnya sebagai akibat rendahnya sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah desa yang dapat diukur dari tingkat pendidikan yang mereka miliki. Di desa Bumbun, berdasarkan hasil penelitian, dalam rangka menganalisis faktor sumber daya manusia sebagai salah satu penyebab terjadinya hubungan dominasi BPD terhadap Pemerintah Desa di desa ini ialah salah satunya disebabkan minimnya tingkat pendidikan dari pemerintah desa itu sendiri. Berdasarkan tingkat pendidikan, aparatur pemerintah desa di desa ini hanya

berpendidikan SMA dibawah, yaitu 3 orang tamat SMA, 4 orang tamat SMP dan bahkan ada 2 orang yang hanya tamat SD. Sedangkan BPD yang menjadi mitra kerjanya memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi yaitu terdapat 3 orang tamat Sarjana (2 orang tamat S1/strata satu dan 1 orang tamat D3/sarjana muda), 1 orang tamat SMA, serta 5 orang tamat SMP.

2. Faktor Kapasitas Pemerintah Desa

Diselenggarakannya pemerintahan desa salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desanya. Dalam mewujudkan itu semua dibutuhkan individu-individu yang memiliki kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya yang ada di desa. Agar pemerintahan desa dapat terlaksana secara nyata serta sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakatnya maka dibutuhkan beberapa kemampuan (kapasitas) yang perlu dikembangkan yaitu terdiri dari kapasitas regulasi, ekstraksi, distributif, responsif, serta kapasitas jaringan dan kerjasama. (Rozaki dkk, 2005:115-116). Berdasarkan pendapat di atas, penulis akan menjelaskan kondisi yang terjadi di desa Bumbun sebagai tolak ukur dari kemampuan pemerintahan desa dalam menjalankan pemerintahannya, yaitu sebagai berikut: *Pertama*, kapasitas regulasi (mengatur) berupa peraturan desa di desa ini belum mampu membuat peraturan desa yang disebabkan minimnya sumber daya manusia pemerintah desa itu sendiri. *Kedua*, kapasitas ekstraksi adalah kemampuan mengumpulkan, mengarahkan dan mengoptimalkan aset-aset desa salah satunya ialah aset fisik berupa kantor desa menurut Ai (informan) bahwa kantor desa di desanya, belum mampu direalisasikan dikarenakan keterbatasan dana. Sedangkan Aset politik atau lembaga-lembaga kemasyarakatan desa, Organisasi GAPOKTAN misalnya desa ini kurang berjalan, hal itu terbukti bahwa organisasi ini sampai sekarang belum bisa mengerakkan pola kerja petani di desa ini yang masih menggunakan cara-cara tradisional dalam mengelola sawah/ladanganya. *Ketiga*, kapasitas distributif yakni membagi sumber daya desa secara seimbang dan merata sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat desa di desa ini sudah cukup merata dan sesuai dengan prioritas kebutuhan yang ada. *Keempat*, kapasitas responsif, untuk kapasitas ini sebenarnya sudah bisa dikatakan dapat terlaksana secara baik khususnya dalam menghimpun aspirasi-aspirasi dari masyarakatnya, namun belum mampu mengimplementasikan aspirasi-aspirasi tersebut

sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya khususnya dalam urusan pembangunan misalnya kebutuhan akan kantor desa. *Kelima*, kapasitas jaringan dan kerjasama di desa ini sudah menerapkannya dengan pihak perusahaan swasta untuk menanamkan modalnya untuk perkebunan Kelapa sawit.

3. Faktor Partisipasi Masyarakat

Selain faktor sumber daya manusia pemerintahan desa dan faktor kapasitasnya, ternyata faktor partisipasi masyarakat desa juga sangat menentukan terselenggaranya pemerintahan desa tersebut, atau dengan kata lain partisipasi masyarakat desa dalam pemerintahan desa sangat menentukan tercapai tidaknya tujuan dari penyelenggaraan pemerintahan desa itu sendiri. Karena pada dasarnya keterlibatan masyarakat secara aktif dalam keseluruhan proses kegiatan (pembangunan di desa) merupakan salah satu bentuk kerja sama antara masyarakat dengan pemerintah desa dalam rangka merencanakan, melaksanakan serta memelihara dan menjaga hasil dari pembangunan itu sendiri. Keterlibatan masyarakat itu seharusnya tidak hanya terlibat pada tahap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan saja, tetapi harus mampu menjaga dan memelihara hasil dari pembangunan yang sudah dibuat bersama.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di desa Bumbun sebagaimana yang disampaikan oleh Ns (informan) "peran serta masyarakat di desa secara umum memang sudah tinggi, hal itu terbukti dalam setiap mengadakan rapat yang diadakan oleh pemerintah selalu hadir". Selanjutnya dalam proses pelaksanaan pembangunan desa, keterlibatan masyarakat di desa ini sudah sangat baik. Hal itu nampak dalam proses pembangunan saluran air bersih di dusun Bumbun yang dikerjakan secara gotong-royong oleh masyarakatnya tanpa mengharapkan imbalan atau upah. Sedangkan pada tahapan pemeliharaan pembangunan di desa ini secara umum masih sangat kurang, kebanyakan dari mereka beranggapan bahwa pemeliharaan pembangunan desa merupakan urusan dari pemerintah desa. Adapun yang menjadi penyebab kurangnya partisipasi masyarakat dalam urusan pemeliharaan pembangunan di desa ini ialah disebabkan minimnya tingkat pendidikan masyarakat yang berdampak pada sikap mental masyarakat tersebut, serta faktor ekonomi masyarakat yang kebanyakan dari

mereka sibuk mengurus atau mengelola pertaniannya.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan atas uraian dan penjelasan terdahulu maka penulis menemukan beberapa kesimpulan dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Bentuk hubungan antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Bumbun lebih mengarah pada hubungan subordinasi, dimana BPD lebih dominan dibandingkan Pemerintah Desa. Terjadinya dominasi ini lebih mengarah pada hal yang positif yaitu demi mengatasi ketertinggalan pembangunan di desanya.

2. Adapun yang menjadi faktor kendala dari hubungan tersebut adalah *pertama*, faktor sumber daya manusia yang dapat dilihat dari tingkat pendidikan dari kedua lembaga tersebut. *Kedua*, faktor kapasitas pemerintah desa dalam memanfaatkan sumber daya yang ada di desa masih sangat kurang. *Ketiga*, faktor partisipasi masyarakat yang masih sangat kurang, khususnya dalam memelihara atau menjaga pembangunan yang ada desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Miriam. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Edisi refisi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Haris, Syamsuddin. 2005. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah*. ed. Jakarta: LIPI Press.
- Kansil, C.S.T., Christine. 2008. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Cet. 2. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Moleng, Lexi, J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulia, Wan Mansor Andi., Ahmad Tohardi. 2005. *Panduan Praktis Menulis Skripsi*. Pontianak: Badan Penerbit Universitas Tanjungpura
- Munawar, Herman Hofi. 2006. *Indonesia Bangkit Dari Desa*. cet. 1. Pontianak: PRAYUDA.
- Rozaki, Abdur., Anang Sabtoni., Arie Sutijo., Hesti Rinandari., Joko Purnomo., Muslichah Setiasih., Sunaji Zamroni., Sutoro Eko., Titok Heriyanto. *Prakarsa Desentralisasi Dan Otonomi Desa*. Yogyakarta: IRE press.

Santoso, Purwo. 2003. *Pembaharuan Desa Secara Partisipatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sudarmayanti. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Refika Aditama.

Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. AlfaBeta

Widjaja, HAW. 2005. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat Dan Utuh*. Ed. 1.,cet. 3. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Yukl (1991). *Tiga Model Hubungan Organisasional*, Diambil pada Tanggal 24 Oktober 2013 dari <http://pustakaonline.wordpress.com/2008/03/22/kemitraan-pemerintah-desa-dengan-badan-perwakilan-desa-dalam-penyelenggaraan-pemerintahan-desa/>.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah